

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan ekonomi telah menjadi salah satu aspek yang mengakibatkan kehancuran antar sesama manusia. Sedikitnya program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan, mengakibatkan mudarnya tali persaudaraan. Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman dana sebagai tambahan modal usaha, tidak sedikit dari mereka terlepas dari peran rentenir. Maka, salah satu program penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman dana yaitu melalui pinjaman dana *al-qardh*.

Qardh merupakan pinjaman atas dasar tolong menolong atau disebut dengan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pada akad *tabarru'*, tidak boleh mensyaratkan imbalan kepada pihak lainnya.¹ Maka, dalam hal ini lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman dana kepada anggotanya melalui prinsip *qardh*, tidak diperkenankan meminta imbalan atau mengambil keuntungan dari anggotanya.

Pelaksanaan penyaluran dana *qardh* pada lembaga keuangan syariah, telah diatur oleh fatwa DSN-MUI. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang penyaluran dana *qardh*. Fatwa

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 66.

pada hakikatnya merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkritan terhadap umat dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan bagaimana aplikasinya.²

Fatwa MUI jika dilihat dalam kerangka hukum nasional, fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, fatwa tidak termasuk salah satu jenis perundang-undangan. Namun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Pada penyaluran *qardh* terkandung banyak nilai kemanusiaan dan sosial dalam memenuhi hajat peminjam modal. Jika terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan, maka dapat membatalkan kontrak.³

Berdasarkan beberapa penelitian terkait pelaksanaan *qardh* pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah, terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian penerapan *qardh* dengan fatwa dewan syariah nasional, diantaranya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firman Al Ghany pada tahun 2015 di BMT El Muawanah 245 Ciparay. Bahwa pada praktiknya, BMT El

² Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 27.

³ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267.

Muawanah 245 Ciparay menerapkan adanya tambahan selain pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh anggotanya. Hal ini tidak sesuai dan menyimpang dari ketetapan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.⁴

Kasus ketidaksesuaian pelaksanaan *qardh* yang kedua yaitu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Suci Asih pada tahun 2016, di BMT El-Mentari Karawangkal, Purwokerto. Pada praktiknya, penerapan *qardh* belum sepenuhnya sesuai dengan akad yang digunakan dan disepakati. Penerapannya lebih mengarah ke *mudharabah*. Pihak BMT menetapkan ketentuan tambahan minimal 1% dan bagi hasil sesuai kesepakatan dan kemampuan pilihan angsuran dari pihak nasabah dan infak kepada nasabah yang ditentukan dari pihak BMT. Jadi belum sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah.⁵

Kasus ketidaksesuaian pelaksanaan *qardh* yang ketiga, yakni berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Musyarofah pada tahun 2015 di BAZNAS Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *qardh* di BAZNAS Kota Semarang belum sesuai dengan teori *al-qardh* yang mengacu pada kaidah “semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba” khususnya terkait pada pengambilan manfaat atas dana *qardh*.⁶

⁴ Firman Al Ghany. “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan al-Qardh di KJKS BMT El Muawanah 245 Ciparay”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2015), 43.

⁵ Sri Suci Asih, “Praktek Akad Al-Qardh Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di BMT El Mentari Karangwangkal)” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

⁶ Siti Musyarofah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)” (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015).

Kasus ketidaksesuaian pelaksanaan *qardh* yang keempat adalah berdasarkan penelitian oleh Achmad Azhar Alam pada tahun 2017 di Bank Syariah BUKOPIN. Hasil dari penelitian ini adalah adanya permasalahan terkait pengaplikasian dan kesesuaian syariah, hal tersebut dikarenakan akad yang seharusnya adalah tolong menolong tetapi diberlakukan pada pembiayaan dan pada pembiayaan tersebut *qardh* sebagai pelengkap pendanaan lain yang menjadikan *qardh* pada pembiayaan tersebut hanya dijadikan awal pada suatu pendanaan lainnya yang akhirnya membuat *qardh* tersebut tidak terlalu berfungsi.⁷

Kasus ketidaksesuaian pelaksanaan *qardh* yang kelima yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin pada tahun 2012 di KJKS BMT Haniva. Hasil dari penelitian ini adalah KJKS BMT Haniva terkendala oleh belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat secara khusus dan profesional dalam menangani *al-qardh*, termasuk juga jumlah uang yang disediakan oleh pihak BMT dinilai belum memadai untuk memulai sebuah usaha. Mental para peminjam juga dinilai cenderung konsumtif. Ketentuan jaminan juga menjadi hambatan tersendiri untuk menarik minat masyarakat. Jaminan itu dinilai terlalu berat dan tidak seimbang dengan dana yang bisa diperoleh.⁸

Mengacu pada kasus ketidaksesuaian penerapan *qardh* pada beberapa penelitian tersebut, maka menarik peneliti untuk melakukan

⁷ Achmad Azhar Alam, "Aplikasi Pembiayaan *Qardh* di Bank Syariah BUKOPIN" (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017).

⁸ Burhanudin, "Pemahaman Dan Penerapan Al-Qardh Pada KJKS BMT Haniva" (Skripsi Fakultas Syar'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

penelitian pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur. Dimana program penyaluran dana *qardh* sudah dilaksanakan dari mulai BMT beroperasi dan berjalan hingga sekarang, kurang lebih sudah berjalan 14 tahun. Sedangkan untuk *qardhul hasan* baru dimulai dari tahun 2015 dan berjalan hingga saat ini. Tujuan utamanya yakni membantu para pedagang kecil dalam peningkatan usaha di wilayah sekitar kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur.

Jumlah dana *qardh* yang disalurkan maksimal sampai dengan Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*). Sedangkan untuk *qardhul hasan* maksimal pinjaman yang diberikan sampai dengan Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Adapun jumlah anggota *qardh* dan *qardhul hasan* sampai saat ini sebanyak 725 anggota yang merupakan jumlah keseluruhan baik dari kantor pusat maupun kantor cabang.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini peneliti mengangkat judul **“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (Studi Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penyaluran dana *qardh* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur?

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Sunjianto selaku Kabag. Marketing. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Gresik, 01 Oktober 2018.

2. Bagaimana kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001 dengan pelaksanaan penyaluran dana *qardh* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran dana *qardh* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001 dengan pelaksanaan penyaluran dana *qardh* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

- a. Bagi Regulator :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan mengenai pelaksanaan penyaluran dana *qardh* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001 yang telah disahkan sebelumnya.

- b. Bagi User :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan menambah pengetahuan bagi nasabah atau anggota lembaga keuangan syariah terkait pelaksanaan penyaluran dana *qardh* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001 yang telah disahkan sebelumnya.

c. Bagi Fasilitator :

Hasil penelitian ini dapat memberikan acuan bagi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur dalam menjalankan program penyaluran dana melalui prinsip *qardh* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan mekanisme pelaksanaan penyaluran dana *qardh* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001 yang telah disahkan sebelumnya, pada perbankan syariah khususnya BMT.

3. Manfaat Ilmiah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penerapan akad *qardh*. Dan selanjutnya dapat menjadi bahan perbandingan dan diskusi bagi seorang akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait dengan penerapan akad *qardh* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001 yang telah disahkan sebelumnya.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini hanya terbatas pada pelaksanaan penyaluran dana melalui prinsip *qardh* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19 tahun 2001.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dijadikan langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan beberapa teori dan referensi untuk mendukung pada penelitian ini. Diantaranya adalah teori mengenai Baitul Maal wa Tamwil (BMT), *qardh*, jaminan, sanksi, sumber dana *qardhdan* lain-lain.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran untuk dijadikan bahan referensi yang bertujuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.